

ABSTRAK

Iwan Setiawan Rahman (2025), *Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)*, dengan Komisi Pembimbingan Dr. Anshar, S.H., M.H (pembimbing I) dan Dr. Amriyanto, S.H., M.H (Pembimbing II).

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Kata kunci: Penyitaan; Uang Pengganti; Korupsi

ABSTRACT

*Iwan Setiawan Rahman (2025), **Confiscation of Assets as an Additional Criminal Penalty in the Form of Compensation Payments in Corruption Cases (A Study at the North Maluku High Prosecutor's Office)**, with Supervision Commissions: Dr. Anshar, S.H., M.H (Supervisor I), and Dr. Amriyanto, S.H., M.H (Supervisor II).*

In an effort to recover state financial losses, one of the measures undertaken is to track or pursue the assets of perpetrators of corruption crimes, with the aim of confiscating them to cover additional penalties in the form of compensation. This study aims to describe the implementation of asset confiscation by prosecutors in corruption court decisions that have obtained permanent legal force at the North Maluku High Prosecutor's Office, as well as the factors that influence it. The results of this study indicate that the implementation of asset confiscation by prosecutors in corruption court decisions that have obtained permanent legal force at the North Maluku High Prosecutor's Office has not been carried out as stipulated in Article 18 of the Corruption Eradication Law, resulting in state financial losses that cannot be recovered through compensation payments. The failure to recover state financial losses through the execution of compensation payments via the confiscation of convicts' assets is influenced by the legal system, which consists of legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: *Confiscation; Compensation; Corruption*

